

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah dan Nahar. (2012). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara." **Jurnal Akuntansi & Auditing**. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189. Hlm. 137-150
- Apriliani, dkk. (2015). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)." **E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1** (Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Hlm. 1-10
- Bastian, Indra. (2010). **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga**. Jakarta. Erlangga.
- Bandariy, Himmah. (2011). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah." **Skripsi**. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://infokorupsi.com> diakses pada 8 Desember 2017
- <http://korantransparansi.com> diakses pada 8 Desember 2017
- <http://surabaya.tribunnews.com> diakses pada 31 Mei 2018
- Mahsun, Mohamad. (2006). **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: BPFEE.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: ANDI.

Mulyana, Budi. (2006). “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” **Jurnal** Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1. Mei 2006.

Nurhayani, Hani. (2010). “Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung.” **Jurnal** Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Hlm. 1-12.

Nordiawan, Deddi. dkk. (2008). **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta : Salemba empat.

Perda Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah

Permendagri No 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Rasul, Syahrudin. (2002). **Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran**. Jakarta: Detail Rekod.
- Rohman, Abdul. (2009). "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". **Jurnal Akuntansi dan Bisnis** Vol 9 No 1 Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rosjidi. (2001). **Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan: Kerangka, Standar dan Metode**. Surabaya: Aksara Satu.
- Safitri, Ratna Amalia. (2009). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)." **Skripsi** Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sande, Peggy. (2013). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat)." **Jurnal Akuntansi**. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatra Utara. Hlm. 1-20
- Santoso, Slamet. (2015). **Penelitian Kuantitatif Metode dan Pengolahan Data**. Ponorogo: Umpo Press.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. (2004). "Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration." **UN DESA**. Hlm. 1-17
- Somad, Abdus. (2016). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)." **Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)**. ISSN: 2337-56xx. Volume:xx, Nomor: xx. Hlm. 1-20

Steccolini, Ileana. (2002). "Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms." **Dublin**. September 2002. Hlm. 1-30

Subekti, Ika Arifanny dkk. (2015). " Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota Banjarmasin)." **JSAI**: Vol. 2 No. 1 Juni 2015. Hlm. 72-84

Sugiyono. (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabet

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103

Wahida, N. (2015). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara." **Skripsi**. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Zama, Riyan Eriko. (2016). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsewu." **Skripsi**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.

www.ponorogo.go.id diakses pada 28 April 2018